



## PEMBERLAKUKAN 100 PERSEN WFH

Deretan gedung perkantoran di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (2/7). Pemerintah akan menerapkan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali mulai 3 Juli mendatang, salah satunya mewajibkan menerapkan "work from home" (WFH) atau bekerja dari rumah 100 persen untuk perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial.

# Pemerintah Tiadakan Sholat Idul Adha Berjamaah di Wilayah PPKM Darurat

Masyarakat diimbau sholat Idul Adha di rumah masing-masing saja dan tidak melakukan takbiran keliling di wilayah yang terapkan PPKM Darurat.

**JAKARTA (IM)** - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, Sholat Idul Adha berjamaah ditiadakan pada wilayah yang masuk zona Pem-

berlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Hal itu dikatakan Yaqut usai mengikuti rapat tingkat menteri (RTM) pembatasan pergerakan

masyarakat selama pelaksanaan Sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban secara virtual, Jumat (2/7).

Selain Sholat Idul Adha, pemerintah juga melarang diadakannya takbiran keliling di wilayah yang masuk dalam PPKM Darurat. Hal tersebut ditujukan untuk menekan penularan virus corona. "Takbiran kita larang di zona PPKM Darurat, takbiran keliling, arak-arakan dilarang. Takbiran dilakukan di rumah masing-masing-

Kemudian Sholat Id di zona PPKM Darurat ditiadakan," kata Yaqut.

Sementara itu, penyembelihan hewan kurban harus dilakukan di tempat terbuka dan orang yang ada di area tersebut harus dibatasi. Hanya orang yang berkorban dan pihak terkait saja yang boleh ada di lokasi.

"Kemudian daging kurban yang biasanya pembagiannya seringkali mengundang kerumunan dengan membagi kupon

sudah diatur bahwa pembagiannya diserahkan langsung pada yang berhak," pungkaskan Yaqut.

Imbauan yang sama juga disampaikan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bahkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah segera menerbitkan fatwa pelaksanaan Idul Adha 1442 Hijriah, yang salah satu poinnya mengimbau masyarakat tidak Sholat Id di lapangan atau masjid/mushalaseiring, Mengingat

► Bersambung ke hal 11

## Anggota DPR Gusvardi Gaus Terancam Sanksi Pidana karena Tak Mau Dikarantina

**JAKARTA (IM)** - Tindakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Gusvardi Gaus yang menolak menjalani karantina sepulangnya dari luar negeri dinilai dapat dijatuhi hukuman pidana. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat, perbuatan Gusvardi tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kerantinaan Kesehatan.

"Kewajiban karantina adalah pelaksanaan UU Kekarantinaan Kesehatan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 yang ancaman pidananya satu tahun. Artinya, resmi berlaku efektif pada saat

terjadinya pandemi," kata Fickar saat dihubungi, Jumat (2/7).

Ia menuturkan, aparat penegak hukum semestinya dapat memproses kasus tersebut secara pidana meskipun dilakukan oleh anggota DPR. Ia mengingatkan, hukum itu bersifat memaksa dalam artian berlaku kepada siapa pun kecuali ada alasan pemaaf, seperti bagi anak-anak, orang dengan gangguan jiwa, atau pembelaan diri.

"Dalam kasus di atas, seharusnya anggota Dewan memberikan contoh dan tauladan pada masyarakat untuk mematuhi

► Bersambung ke hal 11

## Seorang Tewas dan 22 Luka-luka, Truk Hantam Bus, 3 Motor dan 4 Rumah Warga

**BUKIT TINGGI (IM)** - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lintas Padang-Bukittinggi dengan lokasi Pancuran Tinggi, Panyalaian, Kecamatan X Koto,

Tanah Datar, Sumatera Barat. Truk Mitsubishi Fuso B 9101 BEV yang dikendarai oleh JW (47) yang datang dari arah Bukittinggi menuju adang Panjang,

tiba-tiba menabrak tiga sepeda motor dan empat rumah warga, serta satu warung makan sebelum

► Bersambung ke hal 11

## Mal Ditutup saat PPKM Darurat, Pekerja Dirumahkan dan Terancam PHK

**JAKARTA (IM)** - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Instruksi No.15/2021 tentang PPKM Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa

dan Bali. Seperti diketahui PPKM Darurat akan dilaksanakan mulai 3-20 Juli mendatang.

Salah satu hal yang diatur dalam Instruksi mendagri (In-

mendagri) tersebut adalah berkaitan dengan sanksi. Para pelaku usaha pun terancam ditutup

► Bersambung ke hal 11

## Sri Mulyani Siapkan Rp 6,1 Triliun buat Perpanjang Bansos 10 Juta Keluarga

**JAKARTA (IM)** - Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 6,1 triliun untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) tunai. Perpanjangan bansos tunai dilakukan selama dua bulan seiring dengan adanya penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa-Bali 3-20 Juli 2021.

"Bantuan sosial tunai diperpanjang dua bulan, terutama untuk meringankan masyarakat yang terdampak pelaksanaan PPKM Darurat," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual, Jumat (2/7).

Ia menjelaskan, bansos tunai tersebut akan diberikan ke 10 juta keluarga yang tidak mampu dan keluarga miskin yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan kartu sembako.

Kriteria lainnya adalah penerima yang memang sudah memiliki nomor induk kependudukan (NIK), kartu keluarga (KK), dan nomor telepon aktif yang bisa dihubungi. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, selama ini bansos tunai sudah diberikan kepada 9,6 juta kelompok penerima manfaat (KPM) dengan anggaran Rp 11,94 triliun.

► Bersambung ke hal 11



## TIGA RUMAH TERTIMBUN TANAH LONGSOR DI KENDARI

Sejumlah warga berada di lokasi rumah yang tertimbun tanah usai dibersihkan menggunakan alat berat di Kelurahan Kedari Caddi, Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (2/7). Dua orang balita korban tanah longsor tersebut saat ini dirawat di rumah sakit di Kendari akibat menderita luka-luka saat tiga rumah di wilayah itu tertimbun usai hujan lebat terjadi selama tiga hari di Kota Kendari.



Yayasan Tzu Chi Indonesia  
Memelajari dan Menyadari  
Kebenaran Lewat Praktik Nyata  
(Master Cheng Yen)

### ASALTAU!

## Uni Eropa Stop Peternakan Hewan dalam Kandang

UNI Eropa (UE) akan segera menghapus peternakan hewan dalam kandang di seluruh wilayah, setelah petisi yang menyerukan diakhirinya praktik tersebut mengumpulkan lebih dari satu juta tandatangan.

Komisi Eropa telah menguraikan rencana untuk mengusulkan undang-undang yang akan menghapus - dan akhirnya melarang - kandang untuk hewan ternak, termasuk kelinci, ayam, burung puyuh, bebek dan angsa.

Komisi mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu (30/6) jika perubahan akan disarankan pada 2023 dan diperkenalkan pada 2027.

Saat ini, hanya ayam petelur, ayam broiler, babi betina dan anak sapi yang dicakup oleh aturan UE tentang kandang.

"Hewan adalah makhluk hidup dan kami memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan bahwa kondisi di peternakan hewan mencerminkan hal ini," Stella Kyriakides, komisaris untuk kesehatan dan keamanan pangan, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Kelompok kampanye menyambut baik perubahan yang diusulkan.

"Hari ini, Komisi Eropa membuat keputusan bersejarah untuk meninggalkan warisan bagi hewan ternak," kata Olga Kikou, kepala

► Bersambung ke hal 11



BANK MAYAPADA  
Melayani Dengan Komitmen

KursRupiah		
MATA UANG	JUAL	BELI
USD	14.629,00	14.404,00
SGD	10.995,00	10.675,00
AUD	11.987,00	10.737,00
EUR	17.478,00	17.133,00
HKD	1.924,00	1.834,00
GBP	20.319,00	19.894,00

Jumat 02 Juli 2021 16.45 WIB